

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM

SPM-02

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- Arsip Data Komputer (ADK)
- Daftar Penghitungan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- SK Pindah
- Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Blanko Visum/Blanko KPS
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- SPK Lembur
- Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Riil
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- SK Mutasi/Pindah
- KP4
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Rekening Pribadi
- Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Bukti Perjanjian/Kontrak
- Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- Berita Acara Pembayaran
- Jaminan Bank
- Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- Surat Dispensasi UP/TUP
- Surat Pernyataan UP/TUP
- Rician Penggunaan TUP
- Rekening Koran Terlampir untuk TUP
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- SPBy (Surat Perintah Bayar)
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Riil
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP

(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
 DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
 KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
 DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya ..SPP
 : Nomor : 02/4027/10/1/2021 TGL 18-01-2021
 NOMINAL TAGIHAN : Rp. 60.000.000

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
<i>Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS</i>					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan dinas dll) Penyelesaian pekerjaan/BAST Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya			SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	18-01-21	f	DRPP No: SPP No: 02/4027/10/1/2021
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP Salah Pengembalian berkas Tagihan Benar Menguji berkas Tagihan Mencetak Menandatangani SPM Surat Pengantar SPM PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		f	SPM No. 02 dan Tgl: 18-01-2021 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	19-01-21	f	SP2D No. dan tgl: 210611301000157 19-01-2021.
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-01-21	f	SP2D No. dan tgl: 210611301000157 19-01-2021

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210611301000157 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	210611301000157	19-01-2021	19-01-2021	60,000,000	00002T/402710/2021	18-01-2021	UP	NON GAJI	Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021 Sesuai SPP Nomor 00002 Tanggal 18 Januari 2021	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

2 lmd S

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 18-01-2021 Nomor : 00002/402710/I/2021

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 60.000.000,-

ENAM PULUH JUTA RUPIAH

Jenis SPM : 10 DANA UP (UYHD) Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2021

Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
UU APBN 2021 NO. 9 TAHUN 2020 402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2021
TANGGAL 23-11-2020

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

00 00 005 01 00

Kegiatan, Output, Lokasi

0000 000 21.51

Jenis Pembayaran : 4 Pengeluaran Transito

Sifat Pembayaran : 1 Dana Uang Persediaan (UP)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
82	60.000.000,-		
Jumlah Pengeluaran	60.000.000,-	Jumlah Potongan	
			Rp. 60.000.000,-

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021 Sesuai SPP Nomor 00002 Tanggal 18 Januari 2021

▪ Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM.

▪ Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



331 202 036 3-2

AMBON, 18 JANUARI 2021
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM
[Signature]
ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. I-1 KAPITAN ULUPAHA NO.1, AMBON 97124; TELEPON (0911) 344346, 312079;
FAKSIMILI (0911) 344364; SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-32/WPB.32/KP.01/2021 13 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah

Yth. KPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
 - b. Surat Permohonan Persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah dari KPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/195/KU.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;
 - c. Surat Pernyataan UP dari KPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/195/KU.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan besaran UP Satker adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu DIPA	10,110,073,000
2	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 (satu) tahun	2,682,111,000
3	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 (satu) tahun	1,609,266,600
4	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) tahun	1,072,844,400
5	Besaran UP Satker per bulan	100,000,000
6	Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP Satker per bulan	0
7	Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran UP tunai (60%)/Perubahan Proporsi UP Tunai	60,000,000
8	Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)/Perubahan Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah	40,000,000

3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon kode (402710) atas beban DIPA TA 2021 No. DIPA-005.01.2.402710/2021 tanggal 23 November 2020 dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).
4. Pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali pembayaran untuk uang makan, uang lembur, honorarium, dan perjalanan dinas.
5. UP Kartu Kredit Pemerintah merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah.

6. Total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah untuk masing-masing Satker adalah paling banyak sebesar UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah.
7. Mematuhi besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/TUP Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
8. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dengan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pih. Kepala Kantor,



Jetty A. M. Saleky

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/201/KU.01/I/2021

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*), yang bertanda tangan dibawah ini :

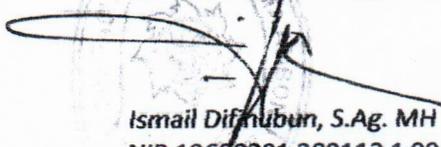
1. Nama : Ismail Difinubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)
4. Kementerian Negara/ Lembaga : Mahkamah Agung RI (005)
5. Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
2. Apabila dalam 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima.
3. Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 18 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,


Ismail Difinubun, S.Ag. MH
NIP 19690201 200112 1 00